



Abdu Syukri/Equator

SPANDUK berisi bukti-bukti korupsi di Kalbar dibentangkan aliansi mahasiswa yang berdemo di Kantor Kejati, Senin (1/11). Kejaksaan diingatkan untuk memproses korupsi Bansos Kalbar.

Aliansi Mahasiswa Gebrak Kejati

PONTIANAK. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum Kalbar mendatangi Kantor Kejati di Jalan Subarkah, Senin (1/11).

Mereka mengingatkan korps Adhiyaksa itu tidak mengabaikan kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Kalbar yang diduga melibatkan mantan anggota DPRD Kalbar periode 2004-2009. "Kita

minta Kejaksaan tidak tebang pilih. Kasus Bansos ini juga harus diproses," kata Philip, penanggungjawab aksi kepada *Equator*, kemarin (1/11).

Philip menilai, sejauh ini penanganan kasus korupsi Bansos tersebut tidak menunjukkan perkembangan menggembirakan. Sayangnya, mereka tidak mengetahui secara persis bahwa kasus

itu bukan ditangani Kejati, melainkan ditangani Polda Kalbar. "Kita minta pelakunya dihukum," tegasnya.

Para mahasiswa ini memulai aksinya di Bundaran Untan sekitar pukul 09.00. Setelah berorasi dan membagikan selebaran, mahasiswa kemudian bergerak ke

■ Halaman 7

Aliansi Mahasiswa

kantor Kejati. Aksi ini mendapat pengawalan ketat puluhan aparat kepolisian dari Polresta Pontianak.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi Bansos Kalbar terjadi pada kurun waktu 2006 hingga 2008. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp22,14 miliar.

Dari hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, ada empat item Bansos yang bermasalah. Item itu masing-masing terkait temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, serta yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar

kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar. Kemudian, pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp 1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar.

Sejumlah nama yang sudah pasti terkait adalah Is, mantan bendahara KONI dan lima mantan anggota DPRD Kalbar periode 2004-2009 yang telah diminta keterangan tim PDTT BPK yakni Zulfahdi M...

..... dari halaman 1

Alep, Luthfi, Zainal Abidin dan Tomy Ria.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Kalbar, Arifin Arsyad yang menerima para mahasiswa menjelaskan bahwa Kejati tidak bisa mengambil alih penanganan kasus tersebut. "Sekarang kasus ini sedang ditangani aparat hukum lain di luar kejaksaan. Kita tidak bisa langsung mengambil alih," kata Arifin.

Ia menuturkan, kejaksaan memang memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Tapi sangat tidak etis kalau mereka langsung melakukan langkah hukum tanpa penyerahan dari aparat hukum yang lebih dulu menangannya. "Kita menunggu